



BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Dasar Hukum pembentukan Kabupaten Sleman adalah Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta JO PP Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959.

Dasar Hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2009 adalah :

1. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

B. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis

a. Letak Wilayah

Kabupaten Sleman secara geografis terletak diantara 107°15'03" dan 100°29'30" Bujur Timur, 7°34'51" dan 7°47'03" Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah,



sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Luas Wilayah

Kabupaten Sleman memiliki wilayah seluas 57.482 Ha (574,82 Km²) atau sekitar 18% dari luas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (3.185,80 Km²), dengan jarak terjauh utara–selatan 32 Km, timur–barat 35 Km. Secara administratif terdiri dari 17 wilayah kecamatan, 86 desa dan 1.212 padukuhan.

Tabel 1.1. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman

No	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Ha)
		Desa	Padukuhan	
1.	Kecamatan Moyudan	4	65	2.762
2.	Kecamatan Godean	7	77	2.684
3.	Kecamatan Minggir	5	68	2.727
4.	Kecamatan Gamping	5	59	2.925
5.	Kecamatan Seyegan	5	67	2.663
6.	Kecamatan Turi	4	54	4.309
7.	Kecamatan Tempel	8	98	3.249
8.	Kecamatan Sleman	5	83	3.132
9.	Kecamatan Ngaglik	6	87	3.852
10.	Kecamatan Mlati	5	74	2.852
11.	Kecamatan Depok	3	58	3.555
12.	Kecamatan Cangkringan	5	73	4.799
13.	Kecamatan Pakem	5	61	4.384
14.	Kecamatan Ngemplak	5	82	3.571
15.	Kecamatan Kalasan	4	80	3.584
16.	Kecamatan Berbah	4	58	2.299
17.	Kecamatan Prambanan	6	68	4.135
	Jumlah	86	1.212	57.482

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sleman



c. Topografi

Wilayah Kabupaten Sleman di bagian selatan datar, daerah perbukitan di bagian tenggara yaitu sebagian Kecamatan Prambanan. Selain itu daerah perbukitan juga terdapat di sebagian Kecamatan Gamping, makin ke utara kondisinya makin miring bahkan di sekitar Lereng Merapi terjal.

Ketinggian wilayah Kabupaten Sleman berkisar antara <100 sampai dengan >1000 m diatas permukaan laut. Daerah tertinggi diatas 1000 meter berada di Kecamatan Pakem, Turi dan Cangkringan, sedangkan daerah terendah (<100 m) berada di Kecamatan Minggir, Moyudan, Godean, Gamping, Berbah dan Prambanan. Data selengkapnya sebagaimana tabel 1.2. berikut:

Tabel 1.2. Ketinggian Wilayah Kabupaten Sleman

No	Kecamatan	< 100 M (Ha)	100 – 499 M (Ha)	500 – 999 M (Ha)	> 1000 M (Ha)	Jumlah (Ha)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Moyudan	2.407	355	-	-	2.762
2.	Minggir	357	2.370	-	-	2.727
3.	Godean	209	2.475	-	-	2.684
4.	Seyegan	-	2.663	-	-	2.633
5.	Tempel	-	3.172	77	-	3.249
6.	Gamping	1.348	1.577	-	-	2.925
7.	Mlati	-	2.852	-	-	2.852
8.	Sleman	-	3.132	-	-	3.132
9.	Turi	-	2.076	2.155	78	4.039
10.	Pakem	-	1.664	1.498	1.222	4.384
11.	Ngaglik	-	3.852	-	-	3.852
12.	Depok	-	3.555	-	-	3.555
13.	Kalasan	-	3.584	-	-	3.584
14.	Berbah	1.447	852	-	-	2.299



1	2	3	4	5	6	7
15.	Prambanan	435	3.700	-	-	4.135
16.	Ngemplak	-	3.571	-	-	3.571
17.	Cangkringan	-	1.796	2.808	195	4.799
	Jumlah	6.203	43.246	6.538	1.495	57.482
	Prosentase (%)	10,79	75,32	11,38	2,60	100

Sumber : Kantor Pertanahan/ Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah

d. Karakteristik Wilayah

- 1) Berdasarkan karakteristik sumberdaya yang ada, wilayah Kabupaten Sleman terbagi menjadi 4 kawasan, yaitu :
 - a) Kawasan lereng Gunung Merapi, dimulai dari jalan yang menghubungkan Kecamatan Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan (*ringbelt*) sampai dengan puncak Gunung Merapi. Wilayah ini kaya sumberdaya air dan ekowisata yang berorientasi pada kegiatan Gunung Merapi dan ekosistemnya. Di daerah Lereng Merapi tersebut, terdapat kurang lebih 100 sumber mata air yang mengalir ke sungai-sungai utama yaitu Sungai Boyong, Kuning, Gendol, Krasak dan anak-anak sungai yang mengalir ke arah selatan serta bermuara di Samudera Indonesia. Keberadaan Gunung Merapi merupakan aset wisata maupun sumberdaya alam galian C, namun diperlukan antisipasi yang memadai untuk mengurangi dampak negatif.
 - b) Kawasan timur, meliputi Kecamatan Prambanan, Kalasan dan Berbah. Di wilayah ini terdapat banyak peninggalan purbakala (candi) yang merupakan pusat wisata budaya. Kondisi lahan kering, memiliki cadangan bahan batu putih yang cukup banyak.
 - c) Kawasan tengah, yaitu wilayah aglomerasi kota Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok, dan Gamping. Wilayah ini merupakan pusat pendidikan, perdagangan, dan jasa.



-
- d) Kawasan barat, meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan, dan Moyudan, merupakan daerah pertanian lahan basah dengan irigasi yang baik, dan sumber bahan baku untuk kegiatan industri kerajinan mendong, bambu, dan gerabah.
- 2) Kabupaten Sleman dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi menghubungkan Kabupaten Sleman dengan kota-kota pelabuhan utama (Semarang, Surabaya, Jakarta). Dengan demikian Kabupaten Sleman berada pada posisi persimpangan jalur ekonomi, sehingga merupakan posisi yang sangat strategis untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Jalur ini melewati wilayah Kecamatan Prambanan, Kalasan, Depok, Mlati, Sleman, Tempel dan Gamping. Selain itu, wilayah Kecamatan Depok, Mlati dan Gamping dilalui jalan lingkar yang merupakan jalan arteri, sehingga menjadikan wilayah tersebut cepat berkembang dan mengalami perubahan dari wilayah pertanian menjadi wilayah industri, perdagangan dan jasa.
- 3) Berdasar letak kota dan mobilitas kegiatan masyarakat, dapat dibedakan fungsi kota sebagai berikut:
- a) Wilayah aglomerasi perkotaan Yogyakarta meliputi Kecamatan Depok, Gamping, sebagian wilayah Kecamatan Ngaglik dan Mlati.
 - b) Wilayah sub-urban yaitu wilayah perbatasan antara desa dan kota meliputi Kecamatan Godean, Sleman dan Ngaglik yang berkembang menjadi tujuan kegiatan masyarakat di wilayah kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.
 - c) Wilayah dengan fungsi khusus atau daerah penyangga (*buffer zone*) meliputi Kecamatan Tempel, Pakem dan Prambanan, yang merupakan pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya.



2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk pada tahun 2009 yang dilaksanakan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) mencapai 1.103.142 jiwa terdiri dari 547.731 laki-laki (49,65%) dan 555.411 perempuan (50,35%), dengan rata-rata kepadatan penduduk 1.919 jiwa per km².

Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tinggi adalah Kecamatan Depok dan Mlati, yang pada tahun 2009 tingkat kepadatan sebesar 3.621,69 jiwa dan Mlati sebesar 3.372,02 jiwa. Kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Yogyakarta. Kondisi tersebut tergambarkan pada tabel berikut:

Tabel 1.3. Jumlah Penduduk Kabupaten Sleman Menurut Jenis Kelamin, Kepadatan dan Rasio Seks Tahun 2009

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Jenis Kelamin		Jumlah	Kepadatan	Rasio Seks
			Laki – laki	Perempuan			
1	Moyudan	27,62	18.174	19.104	37.278	1.349.67	105,11
2	Minggir	27,27	18.882	19.842	38.724	1.420.02	105,43
3	Seyegan	26,63	25.967	26.942	52.909	1.986.81	103,75
4	Godean	26,84	36.919	37.515	74.434	2.773.24	101,61
5	Gamping	29,25	45.589	46.171	91.760	3.217.39	101,27
6	Mlati	28,52	47.848	48.327	96.175	3.372.19	101,29
7	Depok	35,55	64.949	64.141	129.090	3.631.22	98,76
8	Berbah	22,99	24.555	25.062	49.617	2.158.20	102,06
9	Prambanan	41,35	32.336	29.851	62.187	1.503.36	92,34
10	Kalasan	35,84	34.810	35.343	70.153	1.957.39	101,53
11	Ngemplak	35,71	29.619	30.685	60.304	1.688.71	103,60
12	Ngaglik	38,52	48.192	48.526	96.718	2.510.83	100,69
13	Sleman	31,32	33.482	34.503	67.985	2.170.65	103,05
14	Tempel	32,49	32.300	33.332	65.632	2.050.85	103,19
15	Turi	43,09	19.506	20.086	39.592	918.82	102,97
16	Pakem	43,84	18.444	19.171	37.615	858.01	103,976
17	Cangkringan	47,99	16.159	16.810	32.969	686.99	104,03
	Jumlah	574,82	547.731	555.411	1.103.142	1.919.11	101,40

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Pada tahun 2009 registrasi penduduk yang lahir sebanyak 10.967 jiwa, penduduk yang meninggal sebanyak 4.806 jiwa, penduduk yang datang sebanyak 17.840 jiwa dan penduduk yang pergi sebanyak 11.507 jiwa, sehingga terjadi migrasi netto sebesar 6.333 jiwa. Komposisi mutasi penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 2005-2009 sebagai berikut:

Tabel 1.4. Mutasi Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2005-2009

Tahun	Lahir	Mati	Datang	Pergi
2005	9.249	4.256	13.897	8.403
2006	8.475	4.768	15.161	8.723
2007	9.622	4.556	17.774	10.986
2008	9.139	4.341	22.134	12.544
2009	9.144	3.910	15.319	9.658

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Berdasarkan latar belakang pendidikan, sebagian besar penduduk Sleman berpendidikan SLTA ke atas. Secara rinci komposisi penduduk berdasarkan latar belakang pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5. Penduduk berumur 15 tahun keatas menurut jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Tahun 2005-2009

No.	Pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan	2005	2006	2007	2008	2009*
1	SD kebawah	32,74	30,40	33,67	33,82	33,33
2	Tamat SLTP	18,26	17,15	16,44	15,65	15,36
3	Tamat SLTA	35,47	37,63	37,42	37,33	37,56
4	Perguruan Tinggi	13,53	14,82	12,47	13,21	13,75
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sleman.

Keterangan: *) = angka sementara

3. Kondisi Pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintahan sesuai misi kabupaten Sleman tahun 2005-2010 ditujukan untuk menjaga terselenggaranya tata pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaannya sesuai kewenangan dan fungsi



pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya untuk mengembangkan dan menyempurnakan kebijakan, regulasi, pelayanan, kelembagaan dan manajerial pemerintahan. Secara makro kondisi pemerintahan tergambarkan sebagai berikut:

a. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah

Langkah awal yang dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menetapkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) tahun 2006-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 7 tahun 2005 dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) tahun 2005-2010 dengan Peraturan Bupati No. 14 tahun 2005. Kedua dokumen tersebut menjadi kerangka acuan yang digunakan di dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dalam implementasinya, RPJM tersebut dijabarkan didalam berbagai aktivitas yang setiap tahun dirangkum dalam rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD), yang prosesnya juga mengakomodasi aspirasi kebutuhan masyarakat melalui musrenbang tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Keberadaan RKPD dimaksudkan untuk menjamin keterikatan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah. Oleh karena itu, proses penyusunan APBD selalu menggunakan RKPD sebagai dasar.

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dianut sistem kehati-hatian baik dalam pengelolaan pendapatan daerah maupun pengalokasian dana. Dengan sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan optimalisasi baik sumber-sumber pendapatan daerah maupun belanja daerah.

Selama lima tahun pendapatan asli daerah dapat terus ditingkatkan, seiring dengan peningkatan alokasi belanja daerah. Hal tersebut dapat tergambarkan sebagai berikut :



Tabel 1.6. Realisasi Pendapatan Asli Daerah, APBD dan Prosentase Kemampuan PAD terhadap APBD Tahun 2005-2009

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi APBD	Prosentase PAD terhadap APBD
2005	77.904.742.688,20	573.589.777.891,00	13,58%
2006	90.710.095.117,40	716.720.139.621,54	12,66%
2007	120.656.548.721,00	896.838.605.009,82	13,45%
2008	140.631.359.142,43	1.050.868.430.555,06	13,38%
2009	157.399.974.580,84	1.139.002.482.963,58	13,82%

Sumber: DPKKD

Walaupun kontribusi PAD pada APBD relatif kecil, namun dari tahun ke tahun pencapaian target PAD selalu diatas 100% dan target rasio kemandirian di dalam RPJM sebesar 13.74% dapat dicapai.

Peningkatan kapasitas pemerintah daerah tidak dapat terlepas dari kondisi kualitas SDM aparatnya sendiri. Berkenaan dengan hal tersebut kebijakan pengelolaan SDM adalah meningkatkan kepatuhan, kualitas, kesejahteraan dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang didukung sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi SDM Aparatur sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.7. Latar Belakang Pendidikan PNS Kabupaten Sleman Tahun 2005-2009

Pendidikan	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
SMP kebawah	802	687	657	608	562
SLTA	3.820	3.472	3.673	3.714	3.698
D1-D4,SM	4215	4.349	4.333	4.213	4.115
S1	3.939	4.102	4.382	4.542	4.804
S2	160	183	258	279	327
Jum. keseluruhan	12.936	12.793	13.303	13.356	13.506

Sumber: Badan kepegawaian Daerah

Untuk meningkatkan kapasitas aparat, telah dilaksanakan diklat struktural dan fungsional sebagai berikut :



Tabel.1.8. Jumlah Aparat yang memperoleh Diklat Tahun 2005-2009

Jenis Diklat	2005	2006	2007	2008	2009
-Struktural	290	298	307	668	632
-Fungsional	208	272	457	353	439
Jumlah Total	498	570	764	1021	1071

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah

Upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah juga dilakukan dengan meningkatkan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam membuat regulasi. Regulasi yang telah disusun pada tahun 2005-2009 sebagai berikut :

Tabel 1.9. Jumlah Produk Hukum Kabupaten Sleman yang disusun tahun 2005-2009

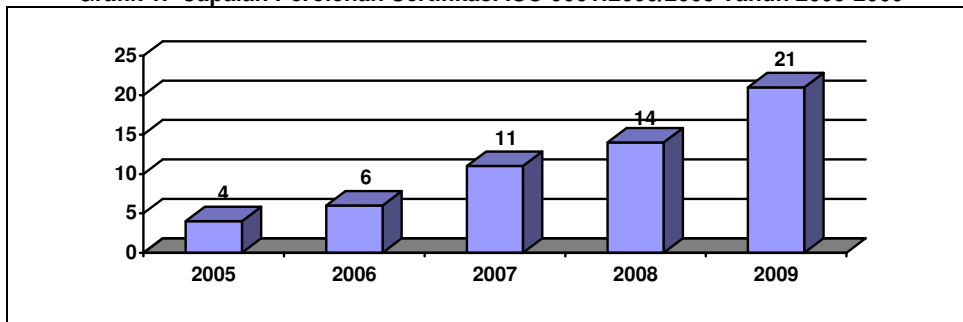
Jenis	Th. 2005	Th.2006	Th.2007	Th.2008	Th. 2009
Perda	8	15	15	8	13
Perbub	21	24	30	45	86
Sk Bupati	254	465	553	336	392

Sumber: Sekretariat Daerah

Peningkatan kemampuan pemerintah juga dilakukan dengan penyempurnaan ketatalaksanaan dan standarisasi pelayanan. Sampai dengan tahun 2009 di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sleman telah terdapat 46 *Standard Operating Procedure (SOP)* yang jalankan di berbagai instansi. Khusus untuk instansi pelayanan masyarakat di bidang Kesehatan dan Pendidikan telah memperoleh sertifikat standar pelayanan berupa ISO 9001 : 2000/2008. Berikut ini jumlah instansi yang telah memperoleh sertifikat ISO selama kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2005 sampai dengan tahun2009.



Grafik 1. Capaian Perolehan Sertifikasi ISO 9001:2000/2008 Tahun 2005-2009



Sumber: Sekretariat Daerah.

Selain itu pada tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Sleman telah menyempurnakan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan PP 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah No.9 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

Perda tersebut juga merupakan implementasi komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dengan prinsip hemat struktur kaya fungsi. Dengan struktur yang baru tersebut struktur organisasi perangkat daerah meliputi: 2 sekretariat, 13 dinas, 4 badan, inspektorat, 2 RSUD, Satuan Polisi Pamong Praja, sekretariat DP Korpri, 5 kantor dan 17 kecamatan. Dalam struktur tersebut tersebut telah dibentuk Kantor Pelayanan Perijinan, Kantor Penyertaan Penguatan dan Penanaman Modal, Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang sebelumnya tugas pokok fungsi pelayanan tersebut belum terwadahi secara khusus dalam sebuah institusi.

Upaya penyempurnaan kelembagaan tersebut juga dibarengi dengan penataan sarana dan prasarana perkantoran. Pemerintah Kabupaten telah berupaya menstandarisasi gedung kantor kecamatan, desa dan puskesmas. Bangunan kantor yang telah terstandarisasi antara lain 4 kantor kecamatan dan 24 puskesmas.



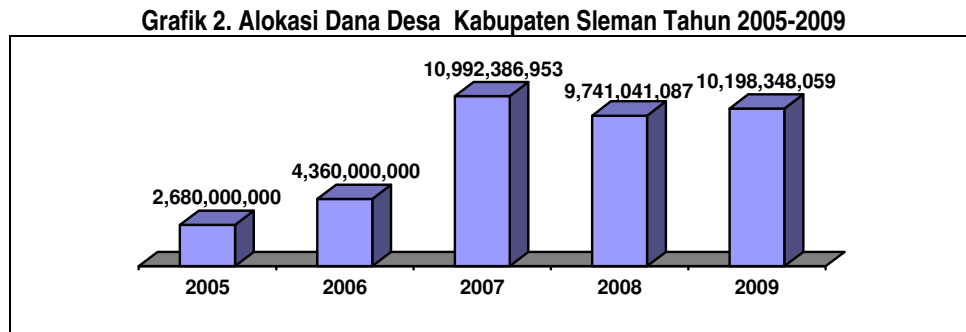
Upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah juga tidak dapat terlepas dari kemampuan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengembangkan kerjasama antar pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Negara lain maupun dengan swasta maupun institusi yang lain.

b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Swasta dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Peran serta masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan pencapaian tujuan. Berkenaan dengan hal tersebut didalam meningkatkan peran serta tersebut kebijakan yang diimplementasikan adalah peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan konsep *distribusi aset*. Dalam strategi ini ikan kail kepada masyarakat mengembangkan kreativitasnya guna memperbaiki taraf hidup atau kesejahteraannya. Konsep tersebut diformulasikan dalam berbagai aktivitas yang antara lain, stimulan dana gotong royong, bantuan sosial, kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi keagamaan sertakelompok binaan dan mitra kerja serta pemberian pelatihan dan keterampilan bagi masyarakat.

Distribusi aset tersebut mampu meningkatkan dan menumbuhkan partisipasi masyarakat. Dana gotong royong tahun 2009 dapat menggali dana partisipasi masyarakatse besar 714% dari bantuan yang diberikan. Di dalam mengoptimalkan peningkatan partisipasi masyarakat dan sekaligus memperkuat pelaksanaan otonomi desa, Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Peraturan Bupati no.23/per.Bup/2006 memberikan dana alokasi Desa sebesar 10% dari dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja Pegawai. Dari tahun ke tahun alokasi dana desa, terus meningkat kecuali pada tahun 2008 menurun, karena Pemerintah Kabupaten Sleman tidak mendapatkan dana bagi hasil pertambangan sebagaimana tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2006 alokasi dana desa yang diluncurkan Rp 4,3 milyar pada tahun 2009 sebesar Rp. 10,198 milyar.

Bahkan untuk mendorong kinerja pemerintahan desa didalam memberikan pelayanan masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sleman juga telah memberikan tunjangan penghasilan bagi pimpinan dan anggota badan permusyawaratan desa, Kepala Desa, perangkat dan staf desa. Alokasi dana tersebut tergambaran dari grafik 2. di bawah ini:



Sumber: Sekretariat Daerah.

4. Kondisi Sosial

a. Indeks Pembangunan Manusia

Secara makro kondisi sosial masyarakat Sleman dapat dijabarkan pada kinerja pemerintah kabupaten Sleman didalam membangun kualitas masyarakat Sleman. Kinerja tersebut dapat diukur salah satunya melalui tingkat pencapaian Indeks Pembangunan Manusia, yang didalamnya mencakup pada tiga aspek yakni kesehatan, pendidikan dan pendapatan. dalam kurun waktu 5 tahun tingkat capaian IPM di kabupaten Sleman dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal tersebut dapat tergambaran dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.10. Indeks IPM Kabupaten Sleman Tahun 2005-2009

No	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009*
1	Kesehatan	79,50	81,33	81,33	82,38	-
2	Pendidikan	82,78	82,78	83,44	83,44	-
3	Pendapatan	64,49	64,57	64,85	65,90	-
	IPM	75,57	76,20	76,70	77,24	-

Sumber : BPS Kabupaten Sleman

Keterangan: *) IPM tahun 2009 belum dihitung



Meningkatnya capaian nilai IPM memperlihatkan terjadinya perbaikan kualitas sumber daya manusia di Sleman dari tahun ke tahun. Menurut kategorisasi, IPM Kabupaten Sleman termasuk dalam kelompok menengah keatas, yakni kelompok dengan nilai IPM berkisar antara 66 hingga 79. Bahkan untuk tingkat Kabupaten di Indonesia, capaian IPM Kabupaten Sleman selalu berada pada urutan teratas.

Secara lebih rinci, kondisi masing-masing aspek agregat tersebut tergambar sebagai berikut :

1) Kesehatan

Peningkatan indeks IPM dari aspek kesehatan, merupakan hasil pembangunan bidang kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sleman, yang ditandai dengan kemampuan yang lebih besar untuk melaksanakan pola hidup sehat, terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh, merata dan dapat terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Capaian tingkat kesehatan masyarakat antara lain dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 1.11. Indikator Kinerja Kesehatan Tahun 2005-2009

No	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1	Angka harapan hidup	72,70	73,80	74,10	74,43	74,76
2	Angka kematian Bayi	7,61	7,63	7,67	5,81	4,08
3	Angka kematian Ibu	69,31	69,31	69,31	69,31	69,39
4	Status Gizi	0,43	0,49	0,49	0,54	0,53

Sumber : BPS Kabupaten Sleman

Rata-rata usia harapan hidup di Sleman berada diatas angka nasional . Pada tahun 2009 usia harapan hidup sebesar 74,76 tahun (72,60 tahun untuk laki-laki dan 76,92 tahun untuk perempuan), lebih tinggi jika dibanding usia harapan hidup tingkat Provinsi DIY yaitu 74 tahun ataupun nasional sebesar 70,6 tahun.



Angka Kematian Bayi (AKB) dapat dipertahankan dibawah 10 per 1000 kelahiran hidup, yang pada tahun 2009 sebesar 4,08 per 1000 kelahiran hidup. AKB tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan AKB Provinsi DIY sebesar 19 per 1000 kelahiran hidup dan AKB tingkat nasional sebesar 34 per 1000 kelahiran hidup. Demikian juga capaian Angka Kematian Ibu (AKI) berada dibawah angka nasional. Pada tahun 2009 sebesar 69,31 sedangkan angka propinsi yang sebesar 104 dan nasioanal 228 per 100.000 kelahiran hidup. Status gizi buruk balita juga terus menurun, pada tahun 2009 sebesar 0,53%. Kondisi tersebut lebih baik dari kondisi gizi buruk balita tingkat provinsi sebesar 0,87% maupun tingkat nasional sebesar 3% (hasil riset kesehatan dasar).

2) Pendidikan

Peningkatan capaian kinerja pendidikan memberikan kontribusi yang sangat penting didalam peningkatan sumberdaya manusia. Pembangunan pendidikan merupakan investasi jangka panjang . Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman di bidang pendidikan telah menunjukkan hasil yang bermakna, meskipun belum dapat menuntaskan seluruh permasalahan di bidang pendidikan.

Tabel 1.12. Capaian Indikator Pendidikan Tahun 2005-2009

No	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1	Angka melek huruf	89,70	91,35	92,17	92,99	93,04
2	Angka Partisipasi kasar					
	SD	111,1	114,74	115,34	115,69	115,79
	SMP/MTs	98,25	114,84	114,99	115,67	115,87
	SMA/SMK/MA	74,03	74,32	75,04	75,45	76,73
3	Angka Patisipasi Murni					
	SD	91,85	96,75	98,78	98,99	99,83
	SMP/MTs	71,91	80,01	80,77	80,98	81,00
	SMA/SMK/MA	52,46	48,41	53,43	53,87	53,89
4	Rata-rata lama sekolah	10,10	10,10	10,10	10,10	10,18

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga



Peningkatan partisipasi masyarakat di dalam pendidikan tersebut, juga diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan yang dilihat dari capaian rata-rata hasil ujian. Pada tahun 2009, angka rata-rata hasil ujian nasional untuk jenjang SD/MI sebesar 7.4, sedangkan rata-rata provinsi 7.46, jenjang SMP/MTs rata-rata 7.18, sedangkan rata-rata provinsi sebesar 7.03, jenjang SMA/MA rata-rata 7.26, sedangkan rata-rata provinsi sebesar 7.19, dan jenjang SMK rata-rata 7.71, sedangkan rata-rata provinsi sebesar 7.71.

3) Pendapatan

Peningkatan pendapatan masyarakat Sleman selama 5 tahun telah mampu meningkatkan capaian indikator IPM secara signifikan. Pendapatan masyarakat yang dilihat dari aspek konsumsi riil per kapita pada tahun 2005 sebesar Rp 639.100 dan pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp 645,90. Peningkatan konsumsi riil perkapita tersebut juga diimbangi dengan pendapatan perkapita.

PDRB perkapita menurut harga berlaku (ADHB) selama 5 tahun meningkat rata-rata per tahun 12,71%. Pada tahun 2005 pendapatan perkapita sebesar Rp7.672.277, pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp12.431.824. Demikian juga PDRB perkapita menurut harga konstan (ADHK 2000) meningkat rata-rata per tahun 2,80% yaitu dari Rp5.082.668 pada tahun 2005 menjadi Rp5.792.964 pada tahun 2009.

Tabel 1.13. PDRB Perkapita Kabupaten Sleman Tahun 2005-2009 (Rupiah)

No	PDRB	2005	2006	2007	2008*)	2009**)
1.	ADHB	7.672.277	8.783.123	9.712.226	11.012.162	12.431.824
2.	ADHK	5.082.668	5.240.006	5.408.803	5.612.511	5.792.964

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sleman.

Keterangan: *) = angka sementara.

**) = angka sangat sementara.

b. Pengangguran

Upaya Penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat dihadapkan dengan tantangan terjadinya bencana alam Gempa bumi pada tahun 2006 dan



juga krisis global yang terjadi pada tahun 2008. Bencana Alam Gempa Bumi telah mengakibatkan menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat pada tahun 2006-2007 terutama UMKM. Sedangkan krisis global yang terjadi berimbas pada penurunan permintaan barang ekspor, sehingga mengganggu upaya penciptaan kesempatan kerja.

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Sleman memperlihatkan bahwa jumlah penduduk usia kerja *dari* tahun ke *tahun* terus meningkat. Jika pada tahun 2005 sebanyak 756.267 orang pada tahun 2009 meningkat 10,88% menjadi 838.624. Peningkatan tersebut juga diimbangi dengan peningkatan angkatan kerja jika pada tahun 2005 sebanyak 522.123 orang, pada tahun 2009 sebanyak 555.736.

Keberhasilan Pemerintah kabupaten Sleman dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sleman juga ditandai dengan menurunnya angka pengangguran terbuka, yang pada tahun 2005 sebesar 8,53% pada tahun 2009 sebesar 5,37%. Secara makro kondisi ketenagakerjaan di kabupaten Sleman sebagai berikut :

Tabel 1.14. Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman tahun 2005-2009

No	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1	Penduduk Usia kerja	756.267	802.226	818.846	828.029	838.624
2	Angkatan kerja	522.123	513.056	548.145	566.659	555.736
	a. Bekerja	477.718	462.754	505.672	527.985	525.911
	b. Mencari Pekerjaan/menganggur	44.405	50.311	42.473	38.674	30.167
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK (%)	68,84	63,95	66,94	68,43	66,26
4	Tingkat Pengangguran terbuka	8,53	9,81	7,75	6,82	5,37
5	Bekerja <35 jam seminggu (%)	24,24	30,31	30,33	19,16	*
6	Bekerja menurut status (%)					
	a. Berusaha sendiri	12,46	14,95	11,89	18,13	*
	b. Berusaha dgn Buruh tidak tetap	17,14	15,42	19,66	18,68	*
	c. Berusaha dgn buruh tetap	2,60	3,6	4,69	4,82	*
	d. Buruh/Karyawan/Pegawai	57,05	58,25	51,24	48,63	*
	e. Pekerja tidak dibayar	10,75	7,79	12,52	9,75	*

Sumber : BPS Kabupaten Sleman

Keterrangan: *) data belum dapat disajikan



Adanya peningkatan masyarakat yang berusaha sendiri cukup positif untuk meningkatkan peluang kerja dan mengatasi permasalahan pengangguran.

c. Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan yang selalu dilaksanakan setiap tahun. Upaya ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman selain untuk mewujudkan visi Kabupaten Sleman juga untuk mengimplementasikan amanat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum maupun pada pasal-pasal nya. Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun tergambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.15. Jumlah keluarga Miskin di kabupaten Sleman Tahun 2005-2009

Tahun	Juml Keluarga Miskin (KK)	Laju Pertumbuhan (%)	Jumlah KK	(%)
2005	60.609	12,50	241.597	25,08
2006	62.518	3,15	245.522	25,46
2007	58.701	-6,10	250.847	23,40
2008	56.857	-3,14	255.555	22,24
2009	65.157	14,56	293.897	22,17

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

Laju tertinggi jumlah angka kemiskinan terjadi pada tahun 2009. Peningkatan yang tinggi tersebut tidak dapat diartikan sebagai kegagalan pembangunan di Sleman. Hal tersebut dikarenakan terdapatnya perbedaan konsep didalam pendataan. Pendataan pada tahun 2005-2008 menggunakan konsep tahapan keluarga sejahtera, sehingga indikatornya tidak seluruhnya sesuai dengan indikator



kemiskinan. Sedangkan pada Tahun 2009 didasarkan pada hasil pendataan yang menggunakan indikator kemiskinan dan diuji publikkan. Di dalam uji publik banyak warga yang yang rentan miskin ketakutan apabila mereka sakit dan membutuhkan biaya besar tidak mendapat jaminan apabila tidak masuk daftar keluarga miskin.

Dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) tahun 2007. Keberadaan tim tersebut merupakan kolaborasi semua unsur (unsur pemerintah terdiri dari organisasi perangkat daerah, swasta dan masyarakat) yang bersama-sama mengkoordinasikan dan mensinkronkan penyusunan, pelaksanaan dan pemantapan kebijakan penanggulangan kemiskinan. TKPKD juga dibentuk di tingkat kecamatan, sedang untuk tingkat pedesaan dan padukuhan terdapat kader program penanggulangan kemiskinan (pronangkis) sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Untuk mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan TKPKD telah mengembangkan strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu dengan menetapkan daerah uji coba penanggulangan kemiskinan di 2 kecamatan yakni kecamatan Seyegan dan Prambanan. Penentuan wilayah uji coba tersebut didasarkan pada penilaian aspek kuantitatif yakni jumlah Rumah Tangga Miskin terbanyak, KK miskin yang menganggur terbanyak, PDRB perkapita yang rendah, aspek Kualitatif yang terdiri dari distribusi kantong miskin, sumber permasalahan yang berpengaruh terjadinya kemiskinan dan karakteristik termasuk budaya penduduk, serta aspek kebijakan pembangunan yang terdiri dari unsur 2 pemerataan pembangunan, keterwakilan wilayah kurang berkembang.

Di dua kecamatan uji coba tersebut difokuskan kegiatan penanggulangan kemiskinan oleh seluruh organisasi perangkat daerah



dan juga kegiatan penanggulangan kemiskinan secara kemitraan dengan swasta melalui *Corporate sosial Responsibility*.

Hasil evaluasi dua kecamatan uji tersebut memperlihatkan terdapatnya penurunan jumlah keluarga miskin di Kecamatan Seyegan yang pada tahun 2008 jumlah keluarga miskin 4715 menjadi 4385 Keluarga miskin pada tahun 2009, sedangkan untuk Prambanan pada tahun 2008 sebanyak 3849 KK, pada tahun 2009 menjadi 4145 KK. Kenaikan di Prambanan lebih dikarenakan terdapatnya persepsi masyarakat jika tidak masuk daftar keluarga miskin, takut jika sakit tidak memperoleh jaminan kesehatan, walaupun secara materi sudah dapat dikategorikan keluarga yang tidak miskin. Perbedaan persepsi tersebut lebih diakibatkan karakteristik budaya.

5. Kondisi Ekonomi

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan rata-rata per tahun 14,13% yaitu dari Rp7,67 triliun tahun 2005 menjadi Rp13,09 triliun pada tahun 2009. PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 (ADHK 2000) mengalami kenaikan rata-rata 4,08% per tahun yaitu dari Rp5,08 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp6,10 triliun di tahun 2009.

Tabel 1.16. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sleman Tahun 2005-2009
(Jutaan Rupiah)

No	PDRB	2005	2006	2007	2008*	2009**
1.	ADHB	7.669.100	8.898.670	9.585.611	11.229.533	13.096.926
2.	ADHK	5.080.564	5.309.059	5.554.773	5.806.220	6.102.886

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sleman.

Keterangan: *) = angka sementara.

**) = angka sangat sementara.



b. Struktur Perekonomian Daerah

Selama periode tahun 2005-2009, kontribusi sektor primer cenderung terus mengalami penurunan yaitu dari 17,86% pada tahun 2005 menjadi 17,77% tahun 2009. Sedangkan kontribusi sektor sekunder terus mengalami kenaikan yaitu dari 27,45% pada tahun 2005 menjadi 28,61% tahun 2009, demikian juga kontribusi sektor tersier mengalami kenaikan yaitu dari 54,89% pada tahun 2005 menjadi 58,17% tahun 2009.

Tabel 1.17. Struktur Perekonomian Kabupaten Sleman Tahun 2005-2009

No	Kelompok Sektor	Kontribusi Terhadap PDRB (%)				
		2005	2006	2007	2008*	2009**
1.	Primer	17,86	17,78	17,22	17,43	17,77
	a. Pertanian	17,49	17,42	16,63	16,91	17,28
	b. Pertambangan & Penggalian	0,37	0,36	0,59	0,52	0,49
2.	Sekunder	27,45	27,76	27,77	27,40	28,61
	c. Industri Pengolahan	16,74	16,45	16,04	15,49	15,77
	d. Listrik, Gas & Air Bersih	0,87	0,86	0,90	0,90	0,96
	e. Bangunan	9,84	10,45	10,83	11,01	11,88
3.	Tersier	54,69	55,14	55,01	55,17	58,17
	a. Perdag., Hotel & Rest.	21,28	21,21	21,69	21,87	23,24
	b. Pengangkutan dan Komunikasi	5,52	5,66	5,80	5,81	6,18
	c. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	10,30	10,16	10,21	10,25	10,80
	d. Jasa-jasa	17,59	17,44	17,31	17,24	17,95
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sleman.

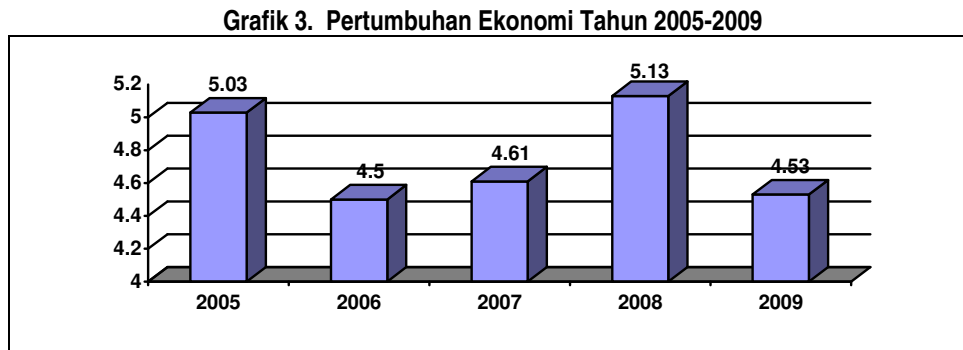
Keterangan: *) = angka sementara.

**) = angka sangat sementara

Empat sektor pendukung utama perekonomian di Kabupaten Sleman selama periode tahun 2005-2009 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa-jasa, sektor industri pengolahan, dan sektor pertanian.

c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman selama 5 tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2005 tumbuh 5,03%, sedangkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 sebesar 4,53%. Perkembangan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 terlihat pada grafik 3 sebagai berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sleman.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 tertinggi terjadi pada sektor bangunan sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada sektor industri pengolahan. Data pertumbuhan ekonomi per sektor secara rinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.18. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman Tahun 2005-2009

No	Lapangan Usaha	Pertumbuhan (%)				
		2005	2006	2007	2008	2009*)
1.	Pertanian	4,81	4,04	2,58	6,94	2,16
2.	Pertambangan	1,17	0,71	7,46	7,96	5,91
3.	Industri Pengolahan	3,98	2,67	2,02	1,52	1,80
4.	Listrik, Gas, dan Air	10,01	2,33	10,48	5,15	5,77
5.	Bangunan	9,46	10,97	8,42	6,86	7,90
6.	Perdagangan, Htl & Rest	5,11	4,15	6,97	5,99	6,24
7.	Pengangkutan	5,43	7,16	7,06	5,40	6,40
8.	Keuangan	6,03	3,17	5,10	5,47	5,37
9.	Jasa	2,95	3,61	3,81	4,70	4,13

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sleman.

Keterangan: *) = angka sementara.



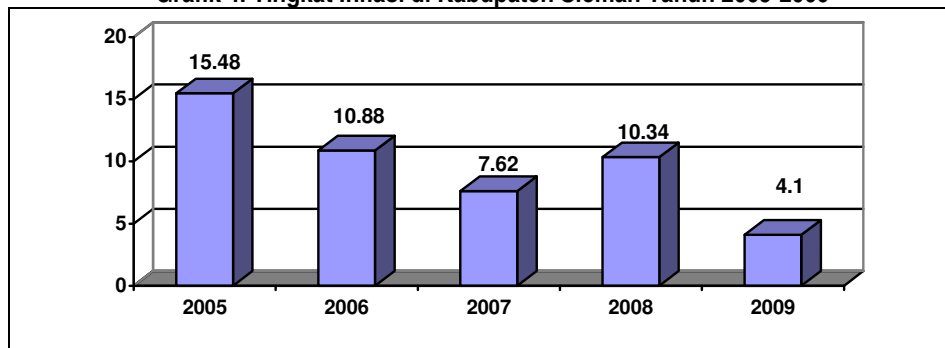
Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, Kabupaten Sleman membuka diri untuk penanaman investasi. Potensi investasi di Kabupaten Sleman terdiri dari berbagai sektor/bidang. Potensi investasi di bidang pertanian meliputi komoditas hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan. Bidang pariwisata antara lain meliputi usaha wisata alam, wisata candi, museum, wisata olahraga, wisata pendidikan, wisata budaya, dan wisata agro. Bidang industri meliputi industri pengemasan, industri pengolahan, dan industri pengolahan bahan galian golongan C.

Investasi yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi di Kabupaten Sleman adalah investasi non fasilitas. Jumlah unit usaha dari investasi tersebut pada tahun 2008 sebanyak 27.783 dengan nilai investasi Rp1.864.631.475,00 pada tahun 2009 meningkat 1,9% menjadi 28.320 dengan nilai investasi Rp1.983.930.216 dengan jumlah tenaga kerja 215.237 orang dan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 16,21%.

d. Inflasi

Pada tahun 2009 tingkat inflasi di Kabupaten Sleman paling rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut salah satunya dikarenakan krisis ekonomi global. Perkembangan tingkat inflasi yang terjadi di Kabupaten Sleman dalam kurun waktu tahun 2005 – 2009 adalah:

Grafik 4. Tingkat Inflasi di Kabupaten Sleman Tahun 2005-2009



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sleman.



Berdasarkan kelompok pengeluaran tingkat inflasi tahun 2009 tertinggi terjadi pada kelompok sandang. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2005 pada kelompok pengeluaran transportasi dan komunikasi, pada tahun 2006 dan 2007 terjadi pada kelompok pengeluaran bahan makanan serta pada tahun 2008 terjadi pada kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar. Secara rinci kondisi inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran yang terjadi di Kabupaten Sleman pada tahun 2005-2009 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1.19. Inflasi Kabupaten Sleman Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2005 - 2009

No	Kelompok Pengeluaran	Tingkat Inflasi (%)				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Bahan Makanan	14,74	16,86	11,12	10,30	5,14
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	16,21	13,38	3,35	7,91	7,31
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	15,39	11,72	5,13	18,90	5,80
4	Sandang	10,20	10,27	5,37	9,18	11,22
5	Kesehatan	7,75	4,02	5,84	4,75	6,16
6	Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga	6,17	11,04	11,08	5,50	-3,52
7	Transportasi dan Komunikasi	26,58	1,92	1,92	4,86	-1,99
	Umum	15,48	10,88	7,62	10,34	4,10

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sleman.

e. Penyerapan Tenaga Kerja

Struktur mata pencaharian pada tahun 2009 mengalami perubahan dibanding pada tahun 2005. Pada tahun 2009 sumber mata pencaharian penduduk Kabupaten Sleman sebagian besar masih bergerak di sektor perdagangan sebanyak 26,36 %, di sektor jasa- jasa 24,90% dan pada sektor pertanian sebanyak 20,31% dan di sektor industri sebanyak 12,83%. Sedangkan pada tahun 2005 sektor penyerap tenaga kerja terbanyak adalah sektor pertanian yang mencapai 28,60%, sektor jasa – jasa 22,69%, sektor perdagangan



21,83% dan sektor industri 11,70%. Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 cenderung menurun, akan tetapi pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 0,87 %. Kondisi tersebut merupakan wujud keberhasilan upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melakukan revitalisasi sektor pertanian. Realita ini juga didukung dengan meningkatnya kontribusi sektor pertanian pada PDRB sebesar 0,37%.

Perubahan juga terjadi pada sektor perdagangan yang pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 meningkat, tetapi untuk tahun 2009 menurun. Kondisi ini lebih diakibatkan adanya krisis ekonomi global pada akhir tahun 2008. Krisis ekonomi global tersebut telah mengakibatkan transaksi perdagangan yang gagal dan bahkan terhenti. Berikut ini gambaran proporsi mata pencaharian penduduk di Kabupaten Sleman :

Tabel 1.20. Proporsi Penduduk Yang Bekerja Per Lapangan Usaha Kabupaten Sleman (%)

No.	Sektor	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Pertanian	28,60	21,61	22,19	18,44	20,31
2	Pertambangan & Penggalian	2,27	0,76	0,57	0,61	0,67
3	Industri	11,70	13,64	12,86	15,48	12,83
4	Listrik, Gas & Air	0,26	0,01	0,16	0,07	0,30
5	Bangunan	4,33	8,12	7,81	7,08	7,77
6	Perdagangan	21,83	22,88	25,99	27,07	26,36
7	Angkutan dan Komunikasi	4,05	4,87	2,94	4,25	3,42
8	Keuangan	4,27	2,51	3,34	3,75	3,43
9	Jasa-jasa	22,69	25,60	24,15	23,31	24,90
10	Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sleman